



**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INVESTASI PMDN
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI
PROVINSI JAWA TIMUR 2010 – 2016**

SKRIPSI

Oleh:

**Nita Pradana Sari
NIM 140810101053**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INVESTASI PMDN
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI
PROVINSI JAWA TIMUR 2010 – 2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Nita Pradana Sari
NIM 140810101053**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sri Surya Ningrum dan Ayahanda Taufiq Hidayat tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Kedua Adikku, Adik Lia dan Adik Tian
3. Pakde dan Bude ku, Pakde Pulung dan Bude Titik
4. Guru-guru sekolahku dan Para Dosen di Perguruan Tinggi yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

“...Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung” (QS. Ali-‘Imran: 173)

“Although they plan, Allah also plans, and Allah is the best of planners”
(QS. Al-Anfal: 30)

“Man Shabara Zhafira”
(Ahmad Fuadi)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nita Pradana Sari

NIM : 140810101053

Judul : Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB dan Investasi PMDN Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 24 April 2018

Yang Menyatakan,

Nita Pradana Sari

NIM. 140810101053

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INVESTASI PMDN
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI
PROVINSI JAWA TIMUR 2010 – 2016**

Oleh :

Nita Pradana Sari
NIM 140810101053

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Zainuri, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB dan Investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.

Nama Mahasiswi : Nita Pradana Sari

NIM : 140810101053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 13 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

Dr.Zainuri, M.Si

NIP. 1963061419990021001

NIP. 196403251989021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin.M.Kes

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INVESTASI
PMDN TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
(TPAK) DI PROVINSI JAWA TIMUR 2010 – 2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nita Pradana Sari

NIM : 140810101053

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

04 Mei 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr.I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)
NIP. 196004121987021001
2. Sekretaris : Dr.Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P. (.....)
NIP. 197207131999031001
3. Anggota : Dr.Moh. Adenan, M.M (.....)
NIP. 196610311992031001



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK), PDRB DAN INVESTASI PMDN TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI PROVINSI JAWA TIMUR 2010 – 2016

Nita Pradana Sari

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 mencapai 128,3 juta orang dan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2016 mencapai 120,8 juta jiwa. Perbandingan dari jumlah angkatan dan jumlah penduduk bekerja menghasilkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi PMDN terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan Fixed Effect dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur, produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur dan investasi PMDN tidak signifikan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, UMK, PDRB dan Investasi PMDN

ANALYSIS OF INFLUENCES MINIMUM WAGES REGENCY/CITY, GRDP AND DOMESTIC INVESTMENT TO LABOR FORCE PARTICIPATION RATE IN EAST JAVA PROVINCE 2010 – 2016

Nita Pradana Sari

Development Economics Departement, Faculty of Economics,

University of Jember

ABSTRACT

Indonesia as one of the developing countries can not be separated from the problems related to the employment. The employment problem faced by Indonesia is the rapid increase of the total workforce by 2016 to 128.3 million people and the number of working population by 2016 reaches 120.8 million people. Comparison of the number of generations and the number of working population generates the labor force participation rate. This study aims to analyze the influence of District / City Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product and Investment PMDN to the Labor Force Participation Rate in East Java Province 2010 - 2016. The method used in this research is panel data with Fixed Effect approach and is associated with descriptive analysis. Based on the result of research indicate that variable of minimum wage of regency / city have significant negative effect to labor force participation rate in East Java Province, gross regional domestic product have a significant positive effect to labor force participation rate in East Java Province and domestic investment has no significant negative effect on the labor force participation rate in East Java Province.

Key Words: Labor Force Participation Rate, Minimum Wages Regency/City, GRDP and Domestic Investment.

RINGKASAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 128,3 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2016 mencapai 120,8 juta jiwa. Perbandingan dari jumlah angkatan dan jumlah penduduk bekerja menghasilkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2016, sedangkan UMK, PDRB dan investasi PMDN mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2016 (BPS Jawa Timur, 2016).

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori yang bersifat deskriptif. Tempat dan waktu dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2010 – 2016. Adapun sumber data yang diambil yaitu dari BPS Jawa Timur, buku literature, jurnal, penelitian terdahulu dan searching internet. Untuk menganalisis penelitian ini apakah ada pengaruh antar variabel bebas (UMK, PDRB dan Investasi PMDN) dengan variabel terikat (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) maka penelitian ini berupa data panel dengan menggunakan alat analisis Eviews 8. Data panel merupakan data gabungan dari data cross section dan data time series. Penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect* sehingga mendapatkan hasil yaitu upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) nilai probability sebesar 0,0467 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien -1,02E-06 artinya setiap kenaikan Rp. 1 UMK akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. PDRB memiliki nilai probability sebesar 0,0368 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 dan nilai koefisien sebesar 5,52E-05 artinya setiap kenaikan Rp. 1 miliar PDRB akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Investasi PMDN memiliki nilai probability sebesar 0,3123 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05

dan nilai koefisien sebesar $-5,61E-08$ artinya investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa upah minimum Kabupaten/Kota dan PDRB berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja sedangkan investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.



PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), PDRB dan Investasi PMDN Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku pembimbing skripsi pertama yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, semangat, motivasi dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Zainuri, M.Si., selaku pembimbing skripsi kedua yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian serta memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memperlancar penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
4. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah memberi banyak hal dalam masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah serta sumbangsih dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orangtuaku, Mama dan Ayah terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan dan doa pastinya yang selalu Beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
7. Kedua adikku, Adik Lia dan Adik Tian terimakasih sudah menjadi pengingat dan penghibur disaat penulis mulai lelah akan segala tugas yang akan diselesaikan.
8. Pakde Pulung dan Bude Titik, terimakasih selama ini selalu membantu atas segala kesulitan yang dialami penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, khususnya Anis, Dewi, Erfa, Lutfi, Meita terimakasih atas motivasi, saran dan dukungannya.
10. Kedua sahabatku, Dyah dan Iis terimakasih selalu menjadi penghibur penulis.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 24 April 2018

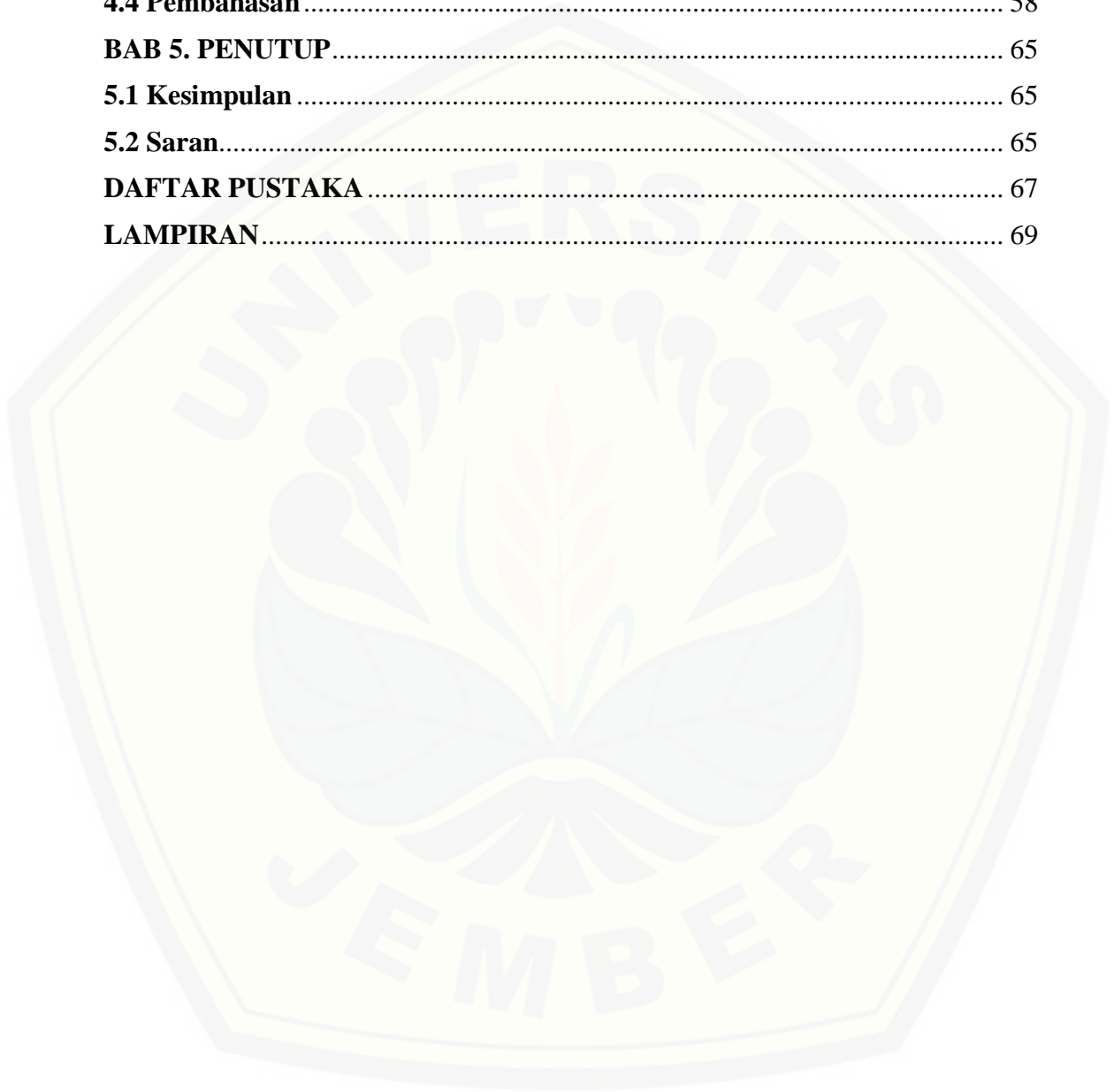
Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Tenaga Kerja	8
2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	9
2.1.3 Teori Upah	10
2.1.3.1 Pengaruh UMK terhadap TPAK	12
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto	12

2.1.4.1 Pengaruh PDRB terhadap TPAK	14
2.1.5 Teori Investasi	14
2.1.5.1 Pengaruh Investasi terhadap TPAK	16
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Konseptual	22
2.4 Hipotesis Penelitian	24
BAB 3. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Metode Analisis Data	26
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	26
3.4.2 Estimasi Regresi Data Panel	27
3.4.3 Uji Model Data Panel	28
3.5 Uji Statistik	29
3.6 Uji Asumsi Klasik	32
3.7 Definisi Operasional	33
BAB 4. PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum	35
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur	35
4.1.2 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja Jawa Timur	36
4.1.3 Keadaan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	38
4.2 Gambaran Umum Variabel	39
4.2.1 Gambaran Umum TPAK di Provinsi Jawa Timur	39
4.2.2 Gambaran Umum UMK di Provinsi Jawa Timur	42
4.2.3 Gambaran Umum PDRB di Provinsi Jawa Timur	45
4.2.4 Gambaran Umum Investasi PMDN di Jawa Timur	48
4.3 Analisis Data	50
4.3.1 Pengujian Data Panel	50

4.3.2 Regresi Data Panel	51
4.3.3 Hasil Uji Statistik	52
4.3.4 Uji Asumsi Klasik	55
4.4 Pembahasan	58
BAB 5. PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

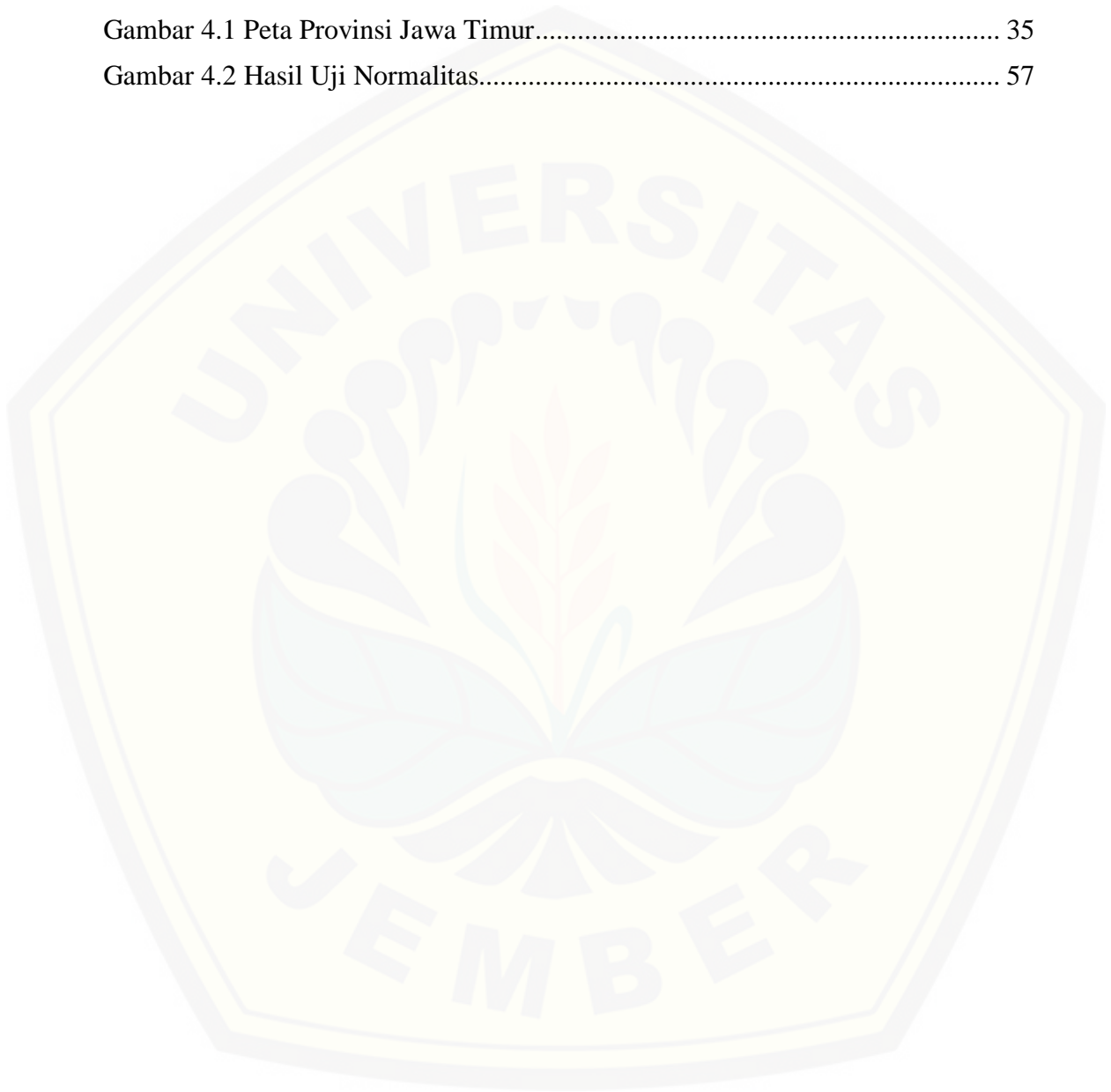


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Investasi Terbesar Di 3 Provinsi Indonesia 2016.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur.....	37
Tabel 4.2 Jumlah Angkatan kerja Provinsi Jawa Timur	37
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Bekerja Provinsi Jawa Timur	38
Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur.....	41
Tabel 4.5 UMK Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 4.6 PDRB Provinsi Jawa Timur.....	47
Tabel 4.7 Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur.....	49
Tabel 4.8 Uji Hausman	50
Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect</i>	51
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56

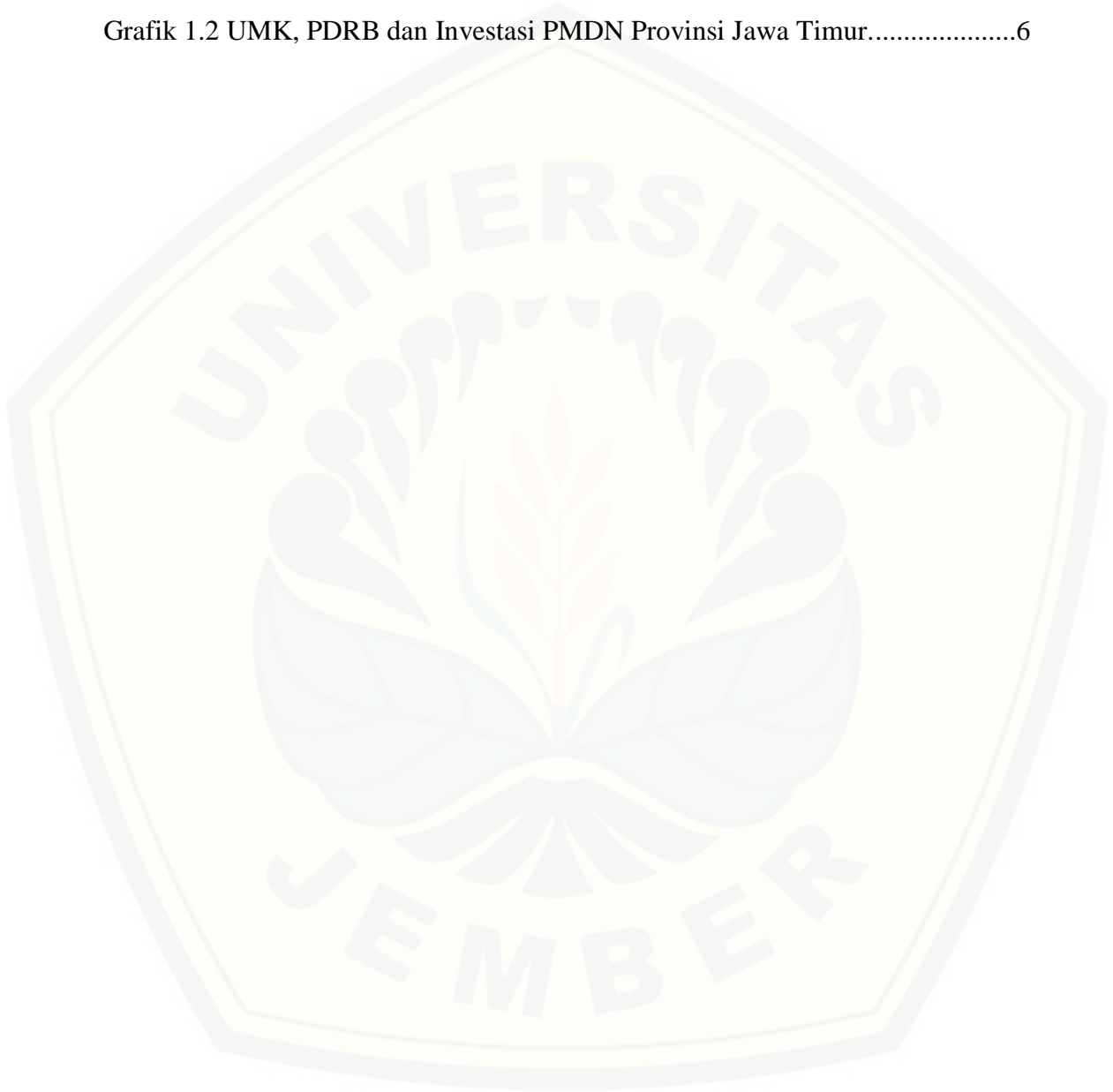
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	35
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	57



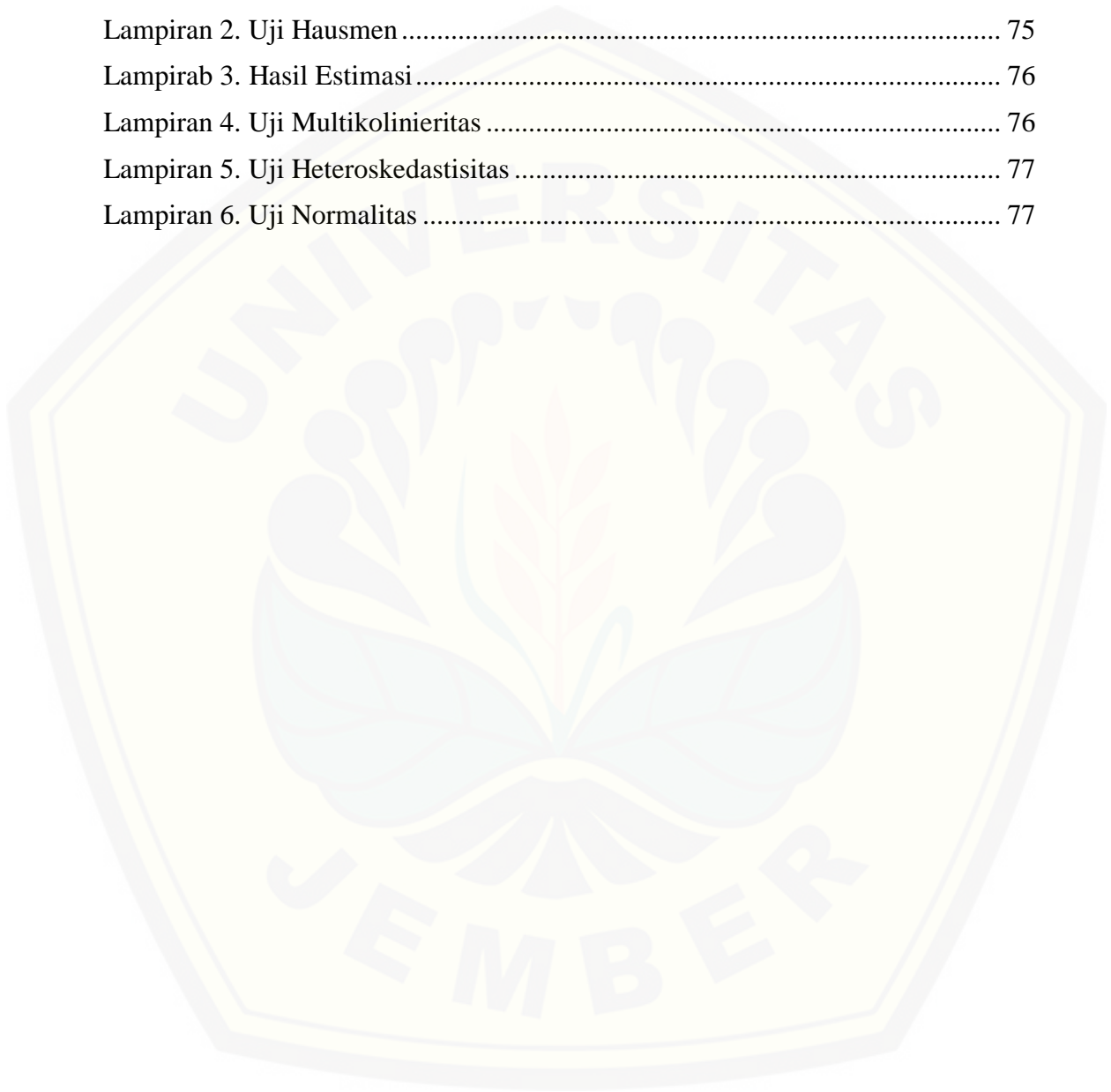
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur.....4
Grafik 1.2 UMK, PDRB dan Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur.....6



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian.....	70
Lampiran 2. Uji Hausmen	75
Lampiran 3. Hasil Estimasi.....	76
Lampiran 4. Uji Multikolinieritas	76
Lampiran 5. Uji Heteroskedastisitas	77
Lampiran 6. Uji Normalitas	77



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan tidak saja menyangkut dimensi ekonomi tetapi juga menyangkut masalah dimensi sosial. Tenaga kerja menjadi salah satu aspek ekonomi yang membutuhkan pengawasan, pengendalian dan kebijakan untuk mengelolanya. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah maka akan menimbulkan masalah serius mengenai tenaga kerja. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang kompleks dan besar, karena dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu dapat dipahami. Masalah tersebut dikatakan sebagai masalah yang besar karena berkaitan dengan jutaan jiwa (Simanjuntak, 2001).

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 261,1 juta jiwa dimana sebagian terdapat jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 128,3 juta orang, jumlah meningkat 6,4 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2015. Sedangkan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2016 mencapai 120,8 juta jiwa atau bertambah 6,2 juta orang bila dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di pasar kerja bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja tersebut, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pengangguran (BPS Indonesia, 2016).

Perbandingan dari jumlah angkatan dan jumlah penduduk bekerja menghasilkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita di kota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10-14 tahun di desa dan lain-lain.

Tidak semua penduduk dalam usia kerja atau tenagakerja terlibat dalam pekerjaan atau mencari pekerjaan. Sebagian bersekolah, mengurus rumah tangga atau sementara tidak bekerja karena alasan-alasan fisik. Dengan kata lain, hanya sebagian tenagakerja tersebut yang siap untuk bekerja. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja maka semakin kecil jumlah angkatan dan akibatnya semakin kecil TPAK (Simanjuntak, 2001).

Pada tahun 2016 tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia mencapai 68,06% mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 65,76%. Peningkatan ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti investasi. Investasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan sumber untuk menaikkan produksi. Menurut Sukirno (2000), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan – peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang – barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa depan. Menurut teori Harrod-Domar, dengan adanya penambahan peralatan-peralatan produksi dapat memperbesar kapasitas produksi sehingga akan berdampak pada penambahan tenaga kerja (M.L. Jhingan, 2016).

Di Indonesia terdapat 3 Provinsi terbesar yang menjadi sasaran investor untuk melakukan investasi. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa 3 Provinsi yang dimaksud yaitu Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp. 46.331,6 miliar, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 30.360,2 miliar dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 24.070,4 miliar. Dari ketiga Provinsi tersebut investasi yang paling besar berada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa Timur menjadi gerbang bisnis untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja di daerah tersebut.

Tabel 1.1 Investasi Terbesar di 3 Provinsi Indonesia 2016

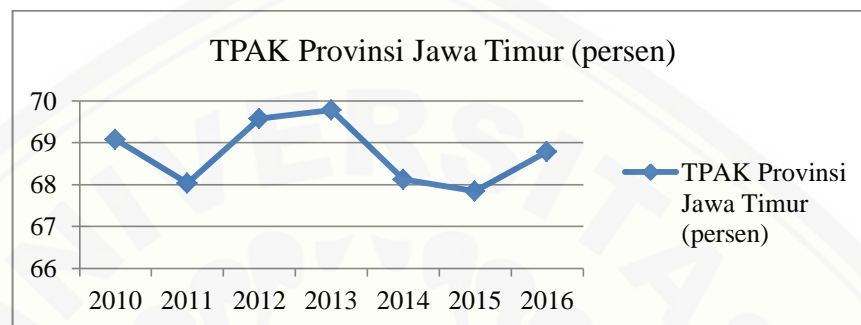
Provinsi	Investasi (miliar rupiah)
Jawa Timur	46.331,6
Jawa Barat	30.360,2
Jawa Tengah	24.070,4

Sumber: BPS Indonesia, 2016

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 39.075,2 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mencapai 20,89 juta jiwa dan jumlah penduduk bekerja sebesar 20,03 juta jiwa. Perbedaan jumlah ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan permintaan serta penawaran tenaga kerja. Dimana angkatan kerja banyak namun tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja, sehingga masih banyak penduduk yang sudah ingin bekerja atau sudah memasuki usia bekerja namun belum terserap oleh pasar kerja. Maka dari itu penciptaan lapangan pekerjaan yang tersedia harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah agar tidak terjadi pengangguran atau mengurangi pengangguran yang sudah ada (BPS Jawa Timur, 2016).

Perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja atau rasio TPAK di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan secara umum bahwa jumlah angkatan kerja yang terserap sebanyak 68,78% pada tahun 2016. Terlihat pada grafik 1.1 pada tahun 2010 TPAK Jawa Timur sebesar 69,08% mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 68,04%. Penurunan yang terjadi karena adanya perubahan struktur ketenagakerjaan dan selain itu penyerapan tenaga kerja belum maksimal padahal jumlah pengangguran sudah mencapai 828.943 orang. Pada tahun 2012 meningkat mencapai 69,57% lalu naik lagi walau tidak signifikan pada tahun 2013 mencapai 69,78%. Pada tahun 2014 angka TPAK menurun lagi sebesar 68,12% dan pada tahun 2015 menurun lagi sebesar 67,84%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 68,78%. Peningkatan terjadi karena dilihat dari TPAK penduduk yang berusia 25-54 tahun, dimana pada umumnya usia sekitaran 25-54 tahun telah menyelesaikan

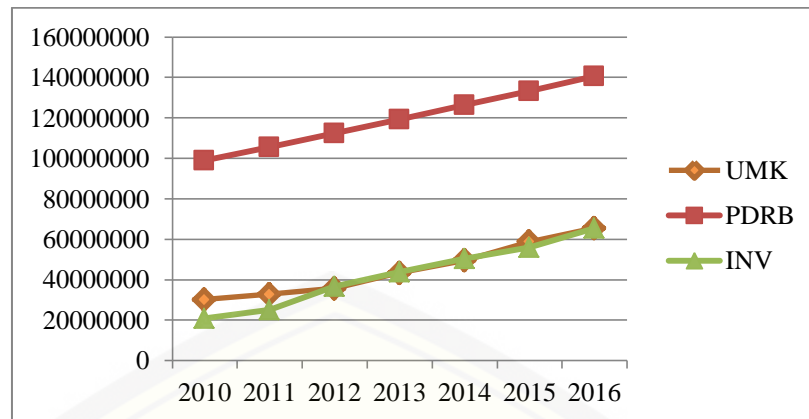
pendidikan dan siap untuk masuk ke pasar kerja (BPS Jawa Timur, 2016). Selain itu adanya pengadaan pelatihan dan pemagangan dalam negeri bertujuan untuk menciptakan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam negeri dan dapat berkontribusi untuk menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki skill dan menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja (Disnakertrans Jawa Timur, 2016).



Grafik 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur 2010 –2016 (*Sumber: BPS Jawa Timur, 2016*).

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur untuk terus meningkatkan angkatan kerja yaitu sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah per kapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Kondisi UMK di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 UMK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.248.318 meningkat di tahun 2011 sebesar Rp.32.805.687 meningkat lagi pada tahun 2012 sebesar Rp. 35.729.806. Tahun 2013 meningkat cukup signifikan sebesar Rp. 43.302.000 dan mengalami peningkatan lagi sebesar Rp. 49.567.780 di tahun 2014. Pada tahun 2015 angka ini meningkat sebesar Rp. 58.758.650 dan meningkat lagi sebesar Rp. 65.574.500 pada tahun 2016 (BPS Jawa Timur, 2016). Kenaikan upah memang dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja melalui Teori Klasik yang menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi mengundang pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan akan makanan menjadi naik sehingga produsen perlu menambah produksinya yaitu dengan penambahan tenaga kerja sebagai pengelola produksi yang dihasilkan (M.L. Jhingan, 2016).

Selain itu upah, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator pembangunan suatu Negara atau Daerah. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 PDRB sebesar Rp. 990.648,80 miliar meningkat pada tahun 2011 PDRB sebesar Rp. 1.054.401,80 miliar meningkat lagi pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.124.464,60 miliar. Pada tahun 2013 PDRB meningkat lagi sebesar Rp. 1.192.789,80 miliar. Tahun 2014 PDRB meningkat cukup signifikan sebesar Rp. 1.262.697,10 miliar dan di tahun 2015 PDRB meningkat sebesar Rp. 1.331.418,20 miliar. Pada tahun 2016 PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.405.236,1 miliar (BPS Jawa Timur, 2016). PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Fenomena tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Teori Lewis, semua sektor ekonomi harus tumbuh serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, salah satu caranya adalah dengan mengalihkan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri. Dalam keadaan demikian, peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja bersumber dari ekspansi kegiatan sektor modern (M.L. Jhingan, 2016:156).



Grafik 1.2 UMK, PDRB dan Investasi PMDN Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016
(Sumber: BPS Jawa Timur, 2016).

Dari latar belakang diatas untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara upah minimum Kabupaten/Kota, PDRB dan investasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur, maka peneliti membahas mengenai “Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB dan Investasi PMDN Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016 ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa timur 2010 – 2016 ?
3. Bagaimana pengaruh investasi PMDN terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi PMDN terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Jawa Timur dengan perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk bekerja di Jawa Timur.
2. Dengan meningkatnya upah minimum Kabupaten/Kota, PDRB dan investasi PMDN di Provinsi Jawa Timur dapat berpengaruh terhadap partisipasi penduduk untuk menjadi angkatan kerja.
3. Peran pemerintah adalah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk angkatan kerja di Jawa Timur seperti infrastruktur yang memadai, contohnya pendidikan (sekolah-sekolah), kesehatan (rumah sakit, puskesmas), tempat pelatihan-pelatihan dan sebagainya.
4. Peran pengusaha yaitu dengan melihat kondisi partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur ini tentunya lebih banyak lagi untuk membuka lowongan pekerjaan supaya penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur terealisasi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Perbedaan antara tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur, jika tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15-64 tahun sedangkan bukan tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur dibawah 15 dan diatas 65 tahun. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) penduduk bersekolah, (2) penduduk yang mengurus rumah tangga, dan lain-lain (Simanjuntak, 2001).

Menurut Jhingan (2016) ada dua teori yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama, adalah teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Terdapat 2 sektor di Negara berkembang yaitu sektor subsisten dan sektor kapitalis. Menurut Lewis sektor subsisten seperti sektor pertanian, sektor informal yang memiliki kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Namun jika di sektor kapitalis yaitu sektor industri yang pekerjanya lebih sedikit. Maka dari itu dari kelebihan pekerja di sektor pertanian diharapkan untuk bisa masuk ke sektor industri.

Teori kedua adalah Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri : kelebihan pekerja, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat penduduk yang tinggi.

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok sama. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok tenaga terdidik, kelompok 10 – 14 tahun di desa (Simanjuntak, 2001:45). Secara singkat partisipasi angkatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut (Simanjuntak, 2001) :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitu pula sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga akan menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dan akibatnya semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan sebagainya. Dengan demikian angka TPAK banyak dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih sekolah maupun penduduk yang mengurus rumah tangga. Kedua faktor tersebut dapat pula dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu di negara-negara yang sudah maju TPAK cenderung tinggi pada golongan umur dan tingkat pendidikan tertentu.

Menurut Simanjuntak (2001) yang dinamakan angkatan kerja adalah jumlah yang bekerja dan pencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik pekerja penuh maupun tidak penuh. Dan tenaga kerja adalah

penduduk usia kerja 10-64 tahun dan secara potensial dapat bekerja. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi yakni 1) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan 2) jumlah penduduk yang berusia dan tidak ingin bekerja (bukan angkatan kerja). Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dari jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dinyatakan dalam bentuk persen (Simanjuntak, 2001).

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai berikut (Simanjuntak, 2001) :

- a. Jumlah penduduk yang masih sekolah
- b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga
- c. Pendapatan
- d. Pendidikan dan Latihan
- e. PDRB
- f. Kegiatan Ekonomi
- g. Tingkat Upah

2.1.3 Teori Upah

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Sebab itu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atau jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Simanjuntak, 2001). Upah dibedakan menjadi 2 yaitu: upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli

barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Sadono Sukirno, 2009:351).

Pada teori ekonomi Klasik, kenaikan upah menyebabkan pertambahan penduduk sehingga permintaan akan kebutuhan hidup akan meningkat, untuk memenuhi permintaan penduduk atas barang yang akan dikonsumsi maka produsen perlu menambah tenaga kerja untuk menghasilkan output (M.L. Jhingan, 2016). Menurut teori permintaan tenaga kerja, membebankan kenaikan tingkat upah kepada konsumen dengan menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasar. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi selanjutnya turunya permintaan masyarakat terhadap hasil produksi sehingga produsen mengurangi produksinya dan mengakibatkan penurunan dalam jumlah jumlah permintaan akan tenaga kerja (Mulia Nasution, 1997:31). Sedangkan menurut teori penawaran tenaga kerja, kenaikan upah akan mengakibatkan penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan (Sadono Sukirno, 2009:364).

Salah satu landasan mikro ekonomi kelompok post Keynesian yaitu teori upah efisien. Teori ini memberi landasan bahwa akan selalu ada pengangguran terpaksa dan adanya *industry fixed effect* yang menyebabkan ketegaran upah karena baik industri yang berupah tinggi maupun yang berupah rendah ternyata tidak melakukan penyesuaian tetapi cenderung mempertahankannya. Menurut teori ini perusahaan akan berprofesi lebih efisien jika upah diatas equilibrium. Teori upah efisien yang dikembangkan oleh Mankiw (2003:52) akan lebih menguntungkan bagi perusahaan apabila perusahaan memberlakukan sistem upah tinggi maka tenaga kerja tersebut akan mempunyai ketenangan berangkat menuju tempat kerja dan di dalam bekerja akan memberikan pemikiran yang maksimum. Dengan demikian tenaga kerja tersebut akan memberikan upah yang maksimal sehingga produktivitas meningkat. Untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan kerjanya. Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan upah yang berlaku

di Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari.

2.1.3.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap TPAK

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sumarsono (2003), besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (scale effect). Suatu kenaikan upah dengan harga barang-barang modal yang lain tetap maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin yang disebut efek substitusi.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah maka semakin besar pula kesempatan berkembang bagi perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Menurut Teori Lewis, semua sektor ekonomi harus tumbuh serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, salah satu caranya adalah dengan mengalihkan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri. Dalam keadaan demikian, peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja bersumber dari ekspansi kegiatan sektor modern (M.L. Jhingan, 2016:156).

Ukuran suatu pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah penjumlahan nilai output akhir perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dan dalam satu kurun waktu tertentu. PDRB terbagi menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga konstan (riil) dan PDRB atas dasar harga berlaku (nominal). PDRB atas dasar harga konstan, jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercemin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku, jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dan digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu negara (Anifatul Hanim dan Aminah, 2005:26).

Adapun cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Anifatul Hanim dan Aminah, 2005:27), yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan pangan/baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung netto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak

diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menunjukkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

2.1.4.1 Pengaruh PDRB terhadap TPAK

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tingkat produksi sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat benar – benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

2.1.5 Teori Investasi

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau disuatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan – peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama

menambah barang – barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk produksi barang dan jasa di masa depan (M.L. Jhingan, 2016:50). Berdasarkan Teori Harrod-Domar (M.L. Jhingan, 2016:231) hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja adalah investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya.

Teori fluktuasi ekonomi dari John Keynes mengemukakan tingkat bunga bukanlah satu-satunya yang menyebabkan naik turunnya investasi melainkan ada kemungkinan keuntungan yang diharapkan dari sejumlah investasi yang disebut Keynes sebagai *marginal efficiency of capital (MEC)*. Yang dimaksud dengan harapan keuntungan adalah besarnya persentase kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Bilamana harapan laba tinggi (MEC), pengusaha menginvestasi lebih besar. Namun jika keuntungan yang diharapkan rendah dari tingkat bunga maka investasi akan mengalami penurunan atau rendah. Jika keuntungan yang diharapkan sama dengan tingkat bunga maka bila perusahaan berorientasi sosial, investasi dilakukan namun bila perusahaan berorientasi profit, investasi tidak dilakukan (Darling, 2008:18). Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan dan karena pendapatan meningkat muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pendapatan dan pekerjaan (M.L. Jhingan, 2016:51).

Investasi dapat berupa penanaman modal melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967, PMA adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, artinya pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, perluasan dan alih status yang terdiri dari saham peserta Indonesia, saham asing dan modal pinjaman. Sedangkan pengertian PMDN menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1968 adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang

dimiliki oleh negara, swasta nasional maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan dan disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967, tentang PMA. Menurut undang-undang ini perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara atau swasta nasional atau sebagai usaha gabungan antara negara atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya modal dimiliki oleh negara. Pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka untuk swasta atau PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.

2.1.5.1 Pengaruh Investasi PMDN terhadap TPAK

Investasi menentukan skala usaha dari suatu industri kecil yang mempengaruhi kemampuan usaha dalam penggunaan faktor produksi yang dilakukan oleh pelaku industri sehingga dapat menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Jika investasi di suatu wilayah naik maka jumlah lowongan kerja akan semakin banyak sehingga akan menyebabkan penawaran akan tenaga kerja juga naik (Niko, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Niko Melly A. (2017) tentang “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur 2011 – 2014”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda data panel dengan bantuan menggunakan program Eviews 8 untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan bebas dan jenis penelitian menggunakan explanatory research berupa data sekunder. Jika disimpulkan dimana variabel investasi (X1) dan PDRB (X3) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Provinsi Jawa Timur sedangkan UMK (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di provinsi Jawa Timur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) tentang “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda data panel. Jenis data merupakan data sekunder. Jika disimpulkan penelitian ini variabel upah minimum provinsi (X1) berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, variabel PDRB (X2) berpengaruh signifikan DAN bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, variabel investasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa 2010 – 2014.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munir Ikhsan (2016) tentang “Analisis Pengaruh Penduduk Usia Kerja, Rata-Rata Lama Sekolah dan Upah Minimum Terhadap TPAK Kab/Kota di Jawa Timur”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis data nya merupakan data sekunder. Jika disimpulkan penelitian ini variabel penduduk usia kerja (X1) berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap TPAK, variabel rata-rata lama sekolah (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap TPAK, variabel upah minimum (X3) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Daru Mahendras Wara (2016) tentang “Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Investasi Terhadap TPAK Pada 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014”. Dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda Data Panel. Jenis data nya merupakan data sekunder. Jika disimpulkan penelitian ini variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap TPAK, variabel upah minimum (X2) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK, variabel investasi (X3) tidak berpengaruh terhadap TPAK.

5. Penelitian dilakukan oleh Melia Elmi Lavianty (2016) tentang “Pengaruh PDRB, Investasi, Upah dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008 – 2013”. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Jadi disimpulkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Azizah (2015) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi TPAK di Jawa Timur (Studi Kasus Sektor Agriculture, Manufacture dan Service)”. Dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda Data Panel. Jenis data nya merupakan data sekunder dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian explanatory research. Jika disimpulkan penelitian ini pada bidang agriculture dimana variabel struktur umur (X1) mempengaruhi TPAK, variabel tingkat upah (X2) berpengaruh terhadap TPAK, variabel tingkat pendidikan (X3) tidak berpengaruh terhadap TPAK. Sedangkan untuk dibidang manufacture dimana variabel struktur umur (X1) mempengaruhi TPAK, variabel tingkat upah (X2) mempengaruhi TPAK, variabel tingkat pendidikan (X3) tidak berpengaruh terhadap TPAK. Jika dibidang service dimana struktur umur (X1) tidak mempengaruhi TPAK, variabel tingkat upah (X2) mempengaruhi TPAK, variabel tingkat pendidikan (X3) berpengaruh terhadap TPAK.
7. Penelitian dilakukan oleh Satrio Bagus Prakoso (2015) tentang “Pengaruh PDRB, Investasi dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Jika disimpulkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.
8. Penelitian dilakukan oleh I Gusti Agung Indradewa (2015) tentang “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Jadi disimpulkan bahwa variabel PDRB (X2) dan upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel inflasi (X1) berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

9. Penelitian dilakukan oleh Arifatul Chusna (2013) tentang “Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah 1980-2011”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Jika disimpulkan bahwa variabel laju pertumbuhan sektor (X1) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, variabel investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel upah (X3) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati (2012) tentang “Pengaruh Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia”. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Jenis data merupakan data sekunder. Jika disimpulkan bahwa variabel upah (X) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y1). Penyerapan tenaga kerja (Y1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y2).
11. Penelitian yang dilakukan oleh Riky Eka Putra (2012) tentang “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Jika disimpulkan bahwa variabel nilai investasi (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y), variabel nilai upah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) dan variabel nilai produksi (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

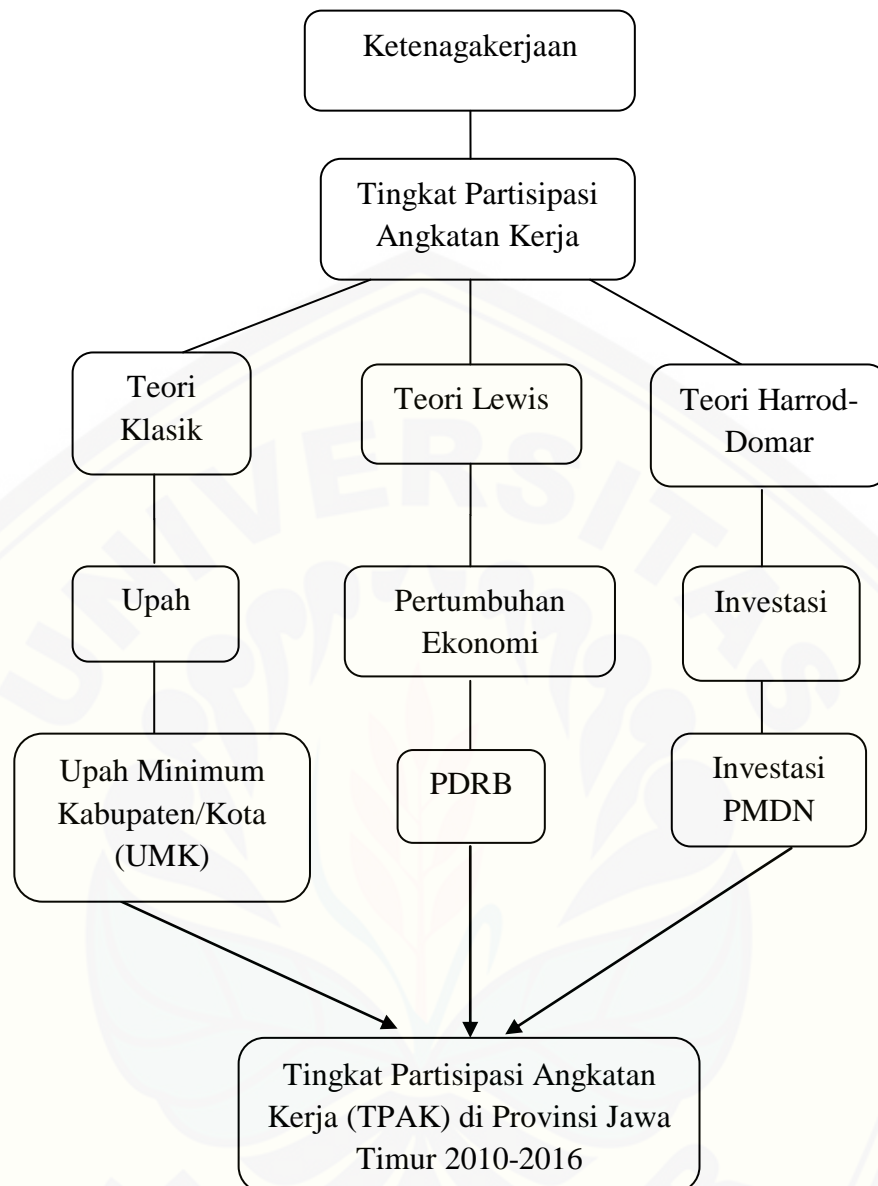
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis Data
Niko Melly A. (2017)	Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Provinsi Jatim 2011-2014	Investasi (x1), UMK (x2), PDRB (x3) dan TPAK Wanita (Y)	Regresi Linier Berganda (Data Panel)
Devanto Shasta Pratomo (2017)	Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U	Pendidikan (x1), umur (x2), status kawin (x3), UMP (x4), tingkat kemiskinan (x5) dan partisipasi angkatan kerja (Y)	Regresi Probit
Ismi Azizah (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi TPAK di Jawa Timur (Studi Kasus Sektor Agriculture, Manufacture dan Service)	Struktur Umur (x1), Tingkat Upah (x2), Tingkat Pendidikan (x3) dan TPAK (Y)	Regresi Linier Berganda
Daru Mahendras Wara (2016)	Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Investasi Terhadap TPAK Pada 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014	PDRB (x1), Upah Minimum (x2), Investasi (x3) dan TPAK (Y)	Regresi Linier Berganda Data Panel
Munir Ikhsan (2016)	Analisis Pengaruh Penduduk Usia Kerja, Rata-Rata Lama Sekolah dan Upah Minimum Terhadap TPAK Kab/Kota di Jawa Timur	Penduduk Usia Kerja (x1), Rata-rata Lama Sekolah (x2), Upah Minimum (x3) dan TPAK (Y)	Regresi Linier Berganda
Ni Luh Putu Dewi Kusumawati (2012)	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Riil di Indonesia 1992 – 2010 (Pendekatan Simultaneous Regression)	PDRB (x1), Investasi Fisik (x2), IHK (x3), UMP (x4), Tingkat Pendidikan (x5) dan TPAK (Y)	Model Persamaan Simultan
Febryana Rizqi Wasilaputri (2016)	Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014	UMP (X1), PDRB (X2), Investasi (X3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Regresi Linier Berganda Data Panel
Rini Sulistiawati (2012)	Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia	Upah minimum (X), Penyerapan tenaga kerja (Y1) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y2)	Regresi data panel

Riky Eka Putra (2012)	Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Nilai investasi (X1), Nilai upah (X2), Nilai produksi (X3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Analisis regresi berganda
Rini Sulistiawati (2012)	Pengaruh Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia	Upah (X), Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y2)	Regresi data panel
Arifatul Chusna (2013)	Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah 1980-2011	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (X1), Investasi (X2), Upah (X3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Analisis regresi berganda
I Gusti Agung Indradewa (2015)	Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali	Inflasi (X1), PDRB (X2), Upah (X3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Regresi linier berganda
Satrio Bagus Prakoso (2015)	Pengaruh PDRB, Investasi dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur	PDRB (X1), Investasi (X2), Upah (X3) dan Kesempatan Kerja (Y)	Regresi linier berganda
Melia Elmi Lavianty (2016)	Pengaruh PDRB, Investasi, Upah dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008 – 2013	PDRB (X1), Investasi (X2), Upah (X2), Inflasi (X3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Regresi data panel

2.3 Kerangka Konseptual

Masalah Ketenagakerjaan yang terjadi pada Negara berkembang seperti Indonesia merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Terutama pada Provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat. Masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Jawa Timur juga terlihat jelas yaitu pada angkatan kerja yang tinggi sehingga juga akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami fluktuasi selama periode 2010 – 2016. Sedangkan untuk kondisi upah minimum Kabupaten/Kota, pdrb dan investasi PMDN mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2016. Berdasarkan pada teori-teori yang ada mengenai ketiga variabel tersebut apakah ada pengaruh terhadap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010 – 2016.

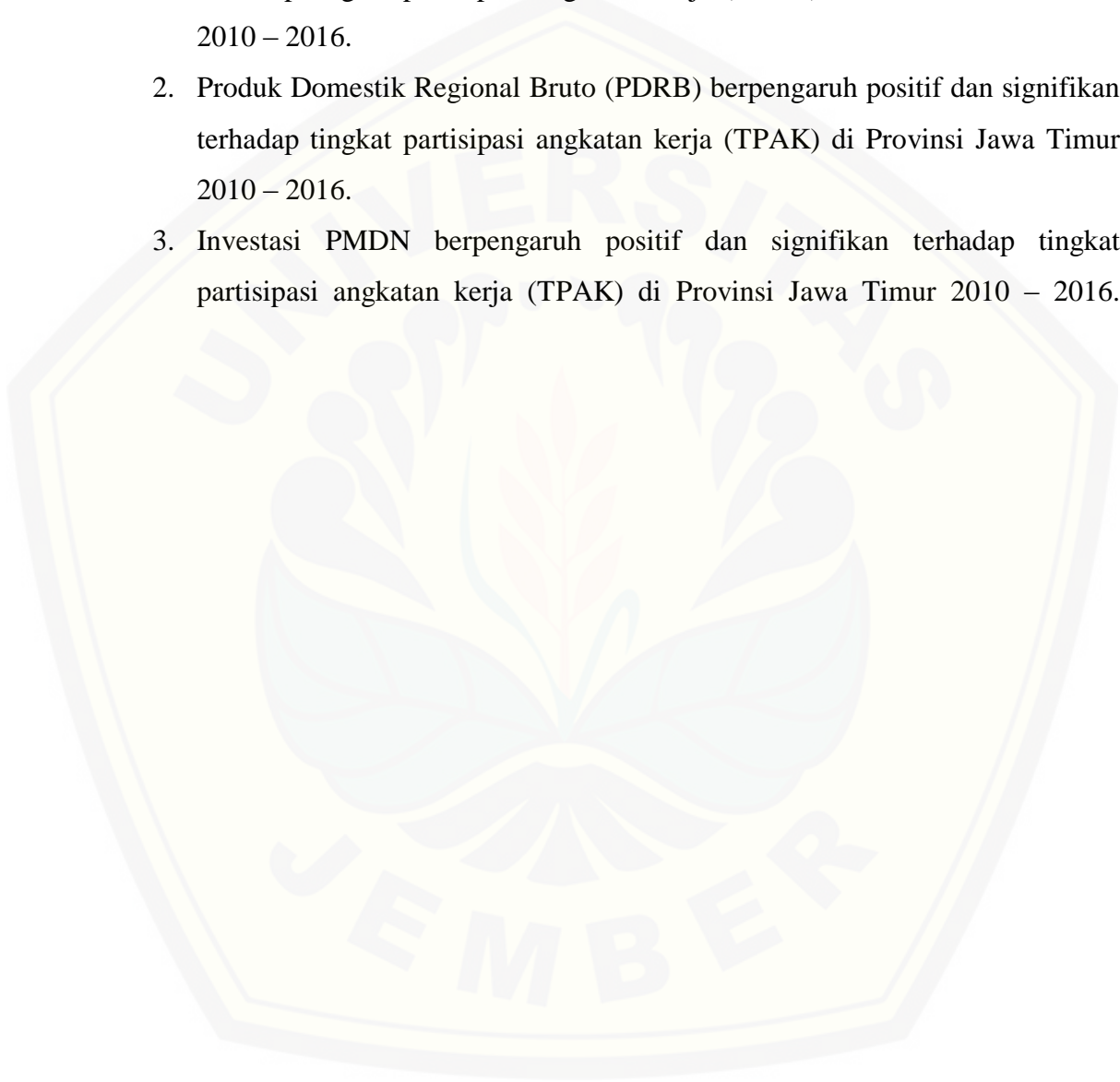


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.
3. Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian eksplanatory yaitu penelitian untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Pada penelitian ini jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis sendiri merupakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang digunakan untuk dapat mengetahui kebenarannya yang belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Penelitian ini bersifat deksriptif kuantitatif, merupakan metode yang dipakai untuk data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan (Mahyus, 2016).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mencakup ruang lingkup yang cukup besar yaitu di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan kurun waktu penelitian ini selama periode 2010 – 2016. Sedangkan tempat penelitian yang di jadikan objek penelitian yaitu di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian tersebut yaitu menggunakan data sekunder berupa data panel. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari pihak atau instansi lain, biasanya data ini disajikan dalam bentuk yang sudah di publikasikan. Data panel merupakan data gabungan dari cross section dan time series. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Jawa

Timur pada publikasi, BPS Indonesia serta berasal dari hasil studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu serta surfing melalui internet mengenai data pada rentang waktu 2010 - 2016.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dari data cross section di 38 Kabupaten/Kota dan data time series selama periode 2010 – 2016. Alat analisis yang digunakan yaitu Program Eviews 8. Persamaan analisis data panel yang digunakan (Mahyus, 2016) :

$$TPAK_{it} = \beta_0 + \beta_1UMK_{it} + \beta_2PDRB_{it} + \beta_3Inv_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (juta rupiah)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)

INV = Investasi (juta rupiah)

i = Cross Section (38 Kabupaten/Kota)

t = Time Series (2010 – 2016)

β_0 = Intercept

β_1 = Pengaruh UMK terhadap TPAK

β_2 = Pengaruh PDRB terhadap TPAK

β_3 = Pengaruh Investasi terhadap TPAK

ϵ = Error term

3.4.4 Estimasi Regresi Data Panel

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu (Mahyus, 2016) :

1. Fixed Effect

Model dengan menggunakan pendekatan ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep atau metode yang mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik variabel dependen di setiap daerah, dimana diasumsikan adanya keterkaitan pengaruh yang selalu tetap antar variabel independen di setiap daerah terhadap variabel dependen. Teknik ini mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Fixed Effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepanya sama antar waktu. Disamping itu model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antardaerah dan antar waktu. Dengan rumus seperti berikut :

$$Y_{it} = X_{it}\beta + C_i + dt + eit$$

Keterangan :

C_i = konstanta yang bergantung pada unit ke-i, tetapi tidak pada waktu t.

dt = konstanta yang bergantung pada waktu t, tetapi tidak pada unit i.

2. Random Effect

Dengan memasukkan variabel dummy di dalam fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan variabel gangguan (error terms) yang dikenal dengan random effect. Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dengan rumus seperti berikut :

$$Y_{it} = X_{it}\beta + V_{it}$$

Keterangan :

$$V_{it} = C_i + dt + e_{it}$$

C_i diasumsikan bersifat independen dan identically distributed (i.i.d).

3.4.5 Uji Model Data Panel

Dalam menganalisis data panel diperlukan uji spesifikasi model yang untuk menggambarkan data dengan kata lain untuk menentukan metode yang paling cocok dipilih antara *random effect* atau *fixed effect* dapat menggunakan Uji Hausman yakni sebagai berikut (Mahyus, 2016) :

a. Uji Hausman

Uji untuk melihat efek acak didalam data panel yakni dengan melakukan uji hipotesis berbentuk $H_0 : E(C_i | X) = F(u) = 0$ atau adanya efek acak di dalam model. Jika H_0 ditolak maka model efek akan tetap digunakan. Dalam melakukan uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori silang lebih besar daripada jumlah variabel bebas termasuk konstanta yang ada di dalam model. Hipotesa pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika Chi-Square statistik \leq Chi-Square tabel maka H_0 ditolak dan lebih menggunakan FEM (Fixed Effect Model).
2. Jika Chi-Square statistik \geq Chi-Square tabel maka H_0 diterima dan lebih menggunakan REM (Random Effect Model).

3.5 Uji Statistik

a) Uji F (Secara Simultan)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat maka digunakan Uji F yaitu uji hipotesa secara gabungan atau serentak untuk mengetahui hubungan antara X1 berhubungan linier baik dengan X2 (Mahyus, 2016):

$$F = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinan

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya sampel

Perumusan hipotesis:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; artinya secara serentak variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$; artinya secara serentak variable bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian dengan *level of significant* 5% :

- Jika probabilitas $F \leq$ level of significant 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variable bebas (UMK, PDRB, investasi PMDN) dengan variable terikat (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja).
- Jika probabilitas $F \geq$ level of significant 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (UMK, PDRB, investasi PMDN) dengan variable terikat (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja).

b) Uji t (Secara Parsial)

Untuk menguji adanya pengaruh masing-masing variabel bebas (UMK, PDRB, investasi PMDN) terhadap variabel terikat (TPAK) secara parsial maka digunakan Uji t (Uji pengaruh secara parsial) dengan rumus (Mahyus, 2016):

$$t = \frac{b_i}{Sb_i}$$

keterangan:

t = t hitung (pengujian secara parsial)

b_i = koefisien regresi

Sb_i = standar error deviasi

Perumusan hipotesis:

- a. $H_0 : b_i = 0$; artinya secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat.
- b. $H_1 : b_i \neq 0$; artinya secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat.

Kriteria pengujian dengan *level of significant* 5% :

- a. Jika probabilitas $t \leq \text{level of significant } 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (UMK, PDRB, investasi PMDN) dengan variable terikat (TPAK).
- b. Jika probabilitas $t \geq \text{level of significant } 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (UMK, PDRB, investasi PMDN) dengan variable terikat (TPAK).

c) Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

R^2 digunakan dalam suatu analisis regresi, koefisien determinasi berganda merupakan suatu ukuran kesesuaian garis regresi terhadap adanya data yang dipakai dalam penelitian atau menunjukkan proporsi dari variabel terikat dengan variabel bebas tunggal sebagai penjelas atau berfungsi untuk menerangkan variabel terikat. R^2 terletak antara 0 dan 1, kecocokan model dikatakan lebih baik apabila nilai R^2 semakin dekat dengan 1 maka dapat diketahui berdasarkan Koefisien Determinasi Berganda (Mahyus, 2016):

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y + \beta_2 \sum X_2 Y + \beta_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

Y = variabel terikat (TPAK)

X_1 = variabel UMK

X_2 = variabel PDRB

X_3 = variabel Investasi PMDN

Kriteria pengujian:

- a. Apabila nilai R^2 mendekati 0 maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Apabila nilai R^2 mendekati 1 maka pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah besar.

3.6 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Adanya kemungkinan terdapat multikolinieritas yaitu : apabila nilai F signifikan tetapi statistik t tidak ada yang signifikan, nilai R^2 tinggi namun banyak t-statistik yang tidak signifikan atau apabila koefisien korelasi antara dua variabel bebas lebih besar 0.80 maka kolinieritas berganda merupakan masalah serius (Dr. Mahyus Ekananda, 2016:95).

b) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian metode Uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel dependen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Wing Wahyu, 2015) :

1. H_0 : tidak ada gejala heteroskedastisitas
2. H_a : ada gejala heteroskedastisitas
3. H_0 diterima bila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan H_0 ditolak bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

c) Uji Normalitas

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji Jarque-Berra LM dan normalitas antara variabel dependen dan independen harus dipenuhi dalam hubungannya dengan keabsahan dengan dilakukannya Uji t dan Uji F. Jika variabel pengganggu memiliki distribusi normal maka Uji t dan Uji F dapat dilakukan, namun jika asumsi normalitas tidak terpenuhi maka tidak dapat

dilakukan uji t dan uji F melainkan hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtotik. Untuk mengukur kenormalan maka dilakukan perhitungan nilai Chi-square dan didasarkan test of skeness dan kurtosis of residual (Wing Wahyu, 2015). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Cs -hitung \geq dari nilai Cs tabel maka variabel pengganggu dari model adalah tidak normal.
- b. Apabila Cs hitung \leq dari nilai Cs tabel maka variabel pengganggu dari model adalah normal.

Penelitian ini menggunakan Jarque-Berra Test dengan cara menghitung skewness dan kurtosis. Jika nilai residual JB hitung \leq nilai X^2 (chi square) tabel atau 5% maka nilai residual dikatakan tidak berdistribusi normal, jika nilai probabilitas JB hitung \geq nilai X^2 (chi square) tabel atau 5 persen maka residual dikatakan berdistribusi normal (Wing Wahyu, 2015).

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

3.7 Definisi Operasional

Sehubungan dengan metode analisis yang digunakan pengujian hipotesis maka digunakan batasan variabel yang digunakan dalam masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja di Jawa Timur dengan penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2010 – 2016 yang dinyatakan dalam bentuk persen.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah yang berlaku di Kabupaten/Kota Jawa Timur periode 2010 – 2016 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

3. Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan nilai output akhir perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan dalam satu kurun waktu tertentu selama periode 2010 – 2016 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
4. Investasi PMDN adalah suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010 - 2016 guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2010 – 2016 berfokus pada pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi PMDN terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016. Saat upah mengalami kenaikan, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016. Saat PDRB mengalami peningkatan, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan juga.
3. Investasi PMDN tidak signifikan negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur 2010 – 2016. Investasi PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur.

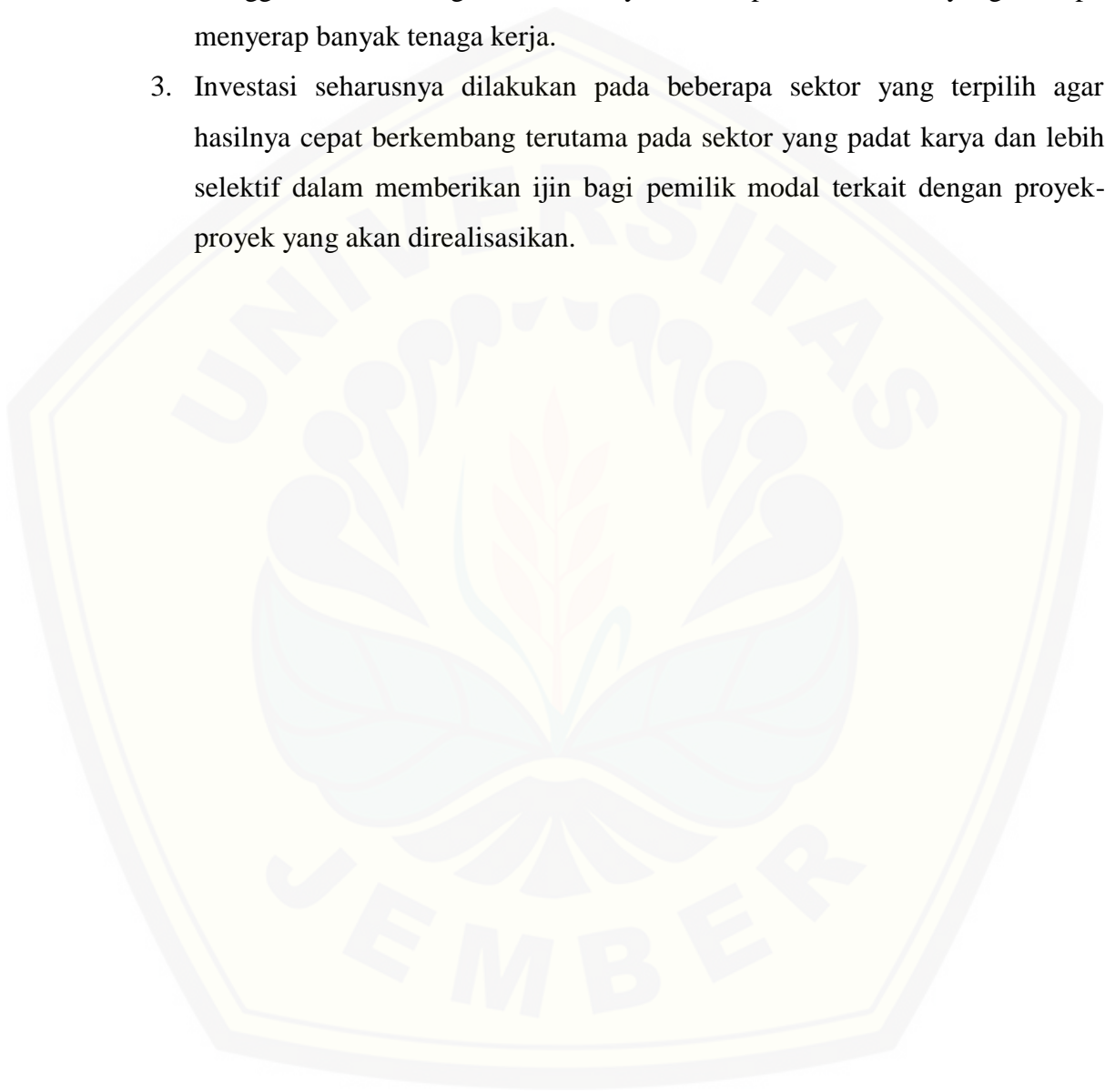
5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dan dapat dikaitkan dengan kesimpulan yang diperoleh, maka yang perlu disarankan dari hasil penelitian berikut adalah:

1. Standar penetapan upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan secara bijaksana dan disarankan perlu dengan pengkajian yang akurat dan tidak terbawa oleh isu atau tren belakangan ini tentang munculnya tuntutan agar segera dinaikkan upah minimum. Terutama kenaikan upah hanya karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya

penetapan upah harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi masyarakat dan mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja.

2. Perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yaitu dengan menggalakkan dukungan ekonominya terhadap sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
3. Investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor yang terpilih agar hasilnya cepat berkembang terutama pada sektor yang padat karya dan lebih selektif dalam memberikan ijin bagi pemilik modal terkait dengan proyek-proyek yang akan direalisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan*, Lembaga penerbit Graha Ilmu.
- Azizah, Ismi. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi TPAK di Jawa Timur (Studi Kasus Sektor Agriculture, Manufacture dan Service)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011 – 2016. *Jumlah Penduduk*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011 – 2016. *Investasi*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011 – 2016. *Produk Domestik Regional Bruto*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011 – 2016. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2011 – 2016. *Upah Minimum Kota*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Darling. 2008. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1996-2006*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Dipublikasikan.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanim, Anifatul. 2005. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jember: Universitas Jember
- Ikhsan, Munir. 2016. *Analisis Pengaruh Penduduk Usia Kerja, Rata-Rata Lama Sekolah dan Upah Minimum Terhadap TPAK Kab/Kota di Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.
- Jhingan, L. M. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M, Insukindro. 1986. *Buku Materi Pokok Teori Ekonomi II*. Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.

- Melly, Niko. 2017. *Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Provinsi Jawa Timur 2011 – 2014*. Skripsi. Universitas Jember.
- Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*.
- Nasution, Mulia. 1997. *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nopirin. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Prasetyo, Leo Mundi. 2010. *Struktur Ketenagakerjaan dan Partisipasi Angkatan Kerja di Pedesaan Indonesia*. Journal Economic.
- Pratomo, Devanto Shasta. 2017. *Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U*. Jurnal Ilmiah.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 1997. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Suroto, 1983. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Gadjah Mada University Press.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Trans. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Wara, Darus Mahendras. 2016. *Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan Investasi Terhadap TPAK Pada 38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.
- Wasilaputri, Febryana Rizqi. 2016. *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Wilayah	Tahun	TPAK (persen)	UMK (rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	INV (juta rupiah)
Pacitan	2010	83	630000	6817.4	710117
Pacitan	2011	81.95	705000	7246.2	849358
Pacitan	2012	79.7	750000	7705	994300
Pacitan	2013	79.44	887250	8157.6	1039251
Pacitan	2014	80.28	1000000	8582.2	1061181
Pacitan	2015	80.64	1150000	9019.5	933375
Pacitan	2016	79.48	1283000	9489.1	802360
Ponorogo	2010	73.74	635000	8961.5	448540
Ponorogo	2011	70.54	705000	9472.2	163664
Ponorogo	2012	73.39	74500	10038.3	222319
Ponorogo	2013	71.81	92400	10554.5	397422
Ponorogo	2014	72.31	1000000	11104.1	472395
Ponorogo	2015	70.24	1150000	11686.2	474466
Ponorogo	2016	72.61	1283000	12305.7	644965
Trenggalek	2010	74.3	635000	7962.1	119119
Trenggalek	2011	77.23	710000	8435.2	110092
Trenggalek	2012	77.27	760000	8959.5	75219
Trenggalek	2013	77.46	903900	9496.7	104270
Trenggalek	2014	74	1000000	9998.4	117539
Trenggalek	2015	74.43	1150000	10500.8	138284
Trenggalek	2016	71.27	1283000	11026.5	106388
Tulungagung	2010	72.73	641000	16776.3	195570
Tulungagung	2011	71.74	720000	17845.2	310436
Tulungagung	2012	72.21	815000	18999	353415
Tulungagung	2013	71.52	1007900	20164.3	539769
Tulungagung	2014	72.57	1107000	21265.2	492992
Tulungagung	2015	69.63	1273050	22236.6	529325
Tulungagung	2016	67.15	1420000	23446.4	629498
Blitar	2010	70.13	655000	16213.9	629498
Blitar	2011	68.89	750000	17093.9	155670
Blitar	2012	73.55	815000	18054.5	205359
Blitar	2013	71.99	946850	18967.3	248741
Blitar	2014	69.12	1000000	19920.2	257977
Blitar	2015	67.57	1260000	20925.5	317964
Blitar	2016	71.05	1405000	21991.4	348752
Kediri	2010	68.04	837500	18254.5	264749
Kediri	2011	66.82	934500	19354.9	299309
Kediri	2012	69.72	999000	20538.3	1834970
Kediri	2013	68.39	1089950	21733.5	415356
Kediri	2014	67.28	1135000	22889.3	394983
Kediri	2015	67.93	1305250	24005.5	417226
Kediri	2016	71.19	1456000	25211.9	528068
Malang	2010	68.26	1000005	41342.9	469550
Malang	2011	66.94	1077600	44091.3	594260
Malang	2012	70.16	1130000	47076	1003822

Malang	2013	68.74	1343700	49571.7	1409442
Malang	2014	66.04	1635000	52549.6	1484227
Malang	2015	66.28	1962000	55316.3	1552680
Malang	2016	66.28	2188000	58247.3	1639182
Lumajang	2010	63.78	688000	14260.1	214804
Lumajang	2011	61.89	740700	15144.4	167647
Lumajang	2012	67.35	825391	16053.4	156131
Lumajang	2013	65.63	1011950	16949.6	223813
Lumajang	2014	65.09	1120000	17852.1	353646
Lumajang	2015	66.75	1288000	18677.7	472239
Lumajang	2016	63.78	1437000	19555.2	642182
Jember	2010	63.78	830000	33375.5	2355728
Jember	2011	68.28	875000	35208.2	520548
Jember	2012	64.3	920000	37262	619639
Jember	2013	65.01	1091000	39519.2	652370
Jember	2014	63.74	1270000	41968.8	638789
Jember	2015	63.98	1460000	44204.1	745221
Jember	2016	68.68	1629000	46526.6	896759
Banyuwangi	2010	70.24	824000	32463.8	370589
Banyuwangi	2011	65.35	865000	34720.4	325779
Banyuwangi	2012	73.42	915000	37235.7	321177
Banyuwangi	2013	72.84	1086000	39733.6	475709
Banyuwangi	2014	69.15	1240000	41997.6	717580
Banyuwangi	2015	72.87	1426000	44523.5	1184476
Banyuwangi	2016	72.87	1599000	46924.6	1712261
Bondowoso	2010	71.48	668000	8515.9	113739
Bondowoso	2011	67.44	735000	9033	87177
Bondowoso	2012	70.74	800000	9583.4	60584
Bondowoso	2013	67.48	946000	10140.1	160792
Bondowoso	2014	70.55	1105000	10651.9	242065
Bondowoso	2015	71.33	1270750	11178.7	206576
Bondowoso	2016	73.3	1417000	11735.6	190475
Situbondo	2010	71.78	600000	8471.4	34586
Situbondo	2011	67.86	733000	8927.1	63259
Situbondo	2012	69.4	802500	9411.6	90446
Situbondo	2013	68.62	1048000	9993.8	104665
Situbondo	2014	66.47	1071000	10572.4	115339
Situbondo	2015	68.9	1209900	11086.5	105563
Situbondo	2016	71.1	1374000	11640.8	109447
Probolinggo	2010	73.28	744000	15028.1	235738
Probolinggo	2011	73.22	814000	15912.5	386103
Probolinggo	2012	75.42	888500	16936.8	159101
Probolinggo	2013	72.81	1103200	17808.9	132942
Probolinggo	2014	69.92	1353750	18681.3	158797
Probolinggo	2015	69.19	1556800	19570.4	432743
Probolinggo	2016	66.59	1603000	20504.1	349987
Pasuruan	2010	70.12	1005000	61178.3	292262
Pasuruan	2011	70.88	1107000	65271.6	423498

Pasuruan	2012	70.22	1252000	70167.1	790298
Pasuruan	2013	70.72	1195000	75044	1058652
Pasuruan	2014	70.91	2190000	80105.3	1340009
Pasuruan	2015	67.7	2700000	84412	384332
Pasuruan	2016	66.61	3037000	89011.2	534397
Sidoarjo	2010	68.81	1005000	81472.7	1971209
Sidoarjo	2011	70.2	1107000	87212.4	2695914
Sidoarjo	2012	66.63	1252000	93543.9	3186341
Sidoarjo	2013	67.37	1720000	99992.5	3892343
Sidoarjo	2014	67.94	2190000	106436	4226924
Sidoarjo	2015	67.49	2705000	112013	4901677
Sidoarjo	2016	64.54	3040000	118179	5438501
Mojokerto	2010	70.51	1009150	34147.1	563209
Mojokerto	2011	66.42	1105000	36405.8	762263
Mojokerto	2012	69.96	1234000	39047.3	1026828
Mojokerto	2013	67.87	1700000	41608.4	1380705
Mojokerto	2014	67.8	2050000	44292.1	1433913
Mojokerto	2015	69.56	2695000	46792.8	1248887
Mojokerto	2016	73.23	3030000	49321.9	1855998
Jombang	2010	68.31	790000	17350.8	88375
Jombang	2011	65.39	865500	18385	167071
Jombang	2012	66.54	978200	19514.8	261734
Jombang	2013	64.18	1200000	20672.3	342393
Jombang	2014	64.82	1500000	21793.2	385773
Jombang	2015	68.79	1725000	22960.2	475147
Jombang	2016	69.39	1924000	24199.1	779883
Nganjuk	2010	65.66	650000	11405.4	85299
Nganjuk	2011	65.55	710000	12061.2	130818
Nganjuk	2012	67.57	785000	12767	132173
Nganjuk	2013	67.57	960200	13456	167029
Nganjuk	2014	67.17	1131000	14142.6	176010
Nganjuk	2015	64.48	1265000	14875.7	198556
Nganjuk	2016	61.98	1411000	15661.8	242364
Madiun	2010	68.03	660000	8119.7	184594
Madiun	2011	68.84	720000	8608.7	194047
Madiun	2012	69.79	775000	9135.7	172582
Madiun	2013	69.86	953000	9654.1	182447
Madiun	2014	68.73	1045000	10169.7	428401
Madiun	2015	66.12	1196000	10705.1	402285
Madiun	2016	64.85	1340000	11268.9	581905
Magetan	2010	78.75	650000	8277.8	161741
Magetan	2011	71.73	705000	8744.8	117219
Magetan	2012	72.09	750000	9251.2	997079
Magetan	2013	71.5	866250	9792.6	1042458
Magetan	2014	69.14	1000000	10292.4	168716
Magetan	2015	70.6	1150000	10824.1	180938
Magetan	2016	77.41	1283000	11398.1	201751
Ngawi	2010	70.73	685000	8456.7	132241

Ngawi	2011	65.3	725000	8973.3	136639
Ngawi	2012	65.69	780000	9568.2	108718
Ngawi	2013	73.17	900000	10094	171303
Ngawi	2014	67.29	1040000	10681	220420
Ngawi	2015	65.95	1150000	11224	248449
Ngawi	2016	66.15	1334000	11807.6	92787
Bojonegoro	2010	67.88	825000	33291.9	448540
Bojonegoro	2011	64.82	870000	36751	265462
Bojonegoro	2012	69.18	930000	38136.1	221115
Bojonegoro	2013	72.99	1029500	39039.4	397652
Bojonegoro	2014	65.49	1140000	39934.4	400272
Bojonegoro	2015	66.22	1311000	46892.8	618990
Bojonegoro	2016	70.51	1462000	57187.4	686486
Tuban	2010	69.96	870000	28017.9	319743
Tuban	2011	65.82	935000	29934.3	651914
Tuban	2012	66.23	970000	31816.3	835271
Tuban	2013	70.01	1144400	33678.8	940856
Tuban	2014	64	1370000	21100.1	1880309
Tuban	2015	67.18	1575500	22316.8	2030868
Tuban	2016	71.71	1757000	39081.8	1787503
Lamongan	2010	66.4	875000	16275.2	190921
Lamongan	2011	63.68	900000	17360.5	265676
Lamongan	2012	68.12	950000	18562.7	361450
Lamongan	2013	70.5	1075700	19484.8	483831
Lamongan	2014	66.64	1220000	21100.1	545329
Lamongan	2015	68.63	1410000	22316.8	595416
Lamongan	2016	68.65	1573000	23623.8	604423
Gresik	2010	67.07	1010400	59068.6	1815702
Gresik	2011	63.65	1133000	62898.7	2192036
Gresik	2012	63.07	1257000	67248.8	2682085
Gresik	2013	67.6	1740000	71314.2	3306614
Gresik	2014	63.66	2195000	76336.7	5155658
Gresik	2015	64.69	2707500	81359.4	7070763
Gresik	2016	68.04	3042500	85835.1	10029496
Bangkalan	2010	67.51	755000	15881.4	19488
Bangkalan	2011	67.47	850000	16406.5	46965
Bangkalan	2012	70.32	885000	16173.7	59966
Bangkalan	2013	70.61	983800	16204	149453
Bangkalan	2014	69.44	1102000	17369.8	177323
Bangkalan	2015	69.64	1267300	16907.1	250420
Bangkalan	2016	68.07	1414000	17018.6	284421
Sampang	2010	72.3	690000	10064	107633
Sampang	2011	74.17	725000	10315.3	81524
Sampang	2012	76.54	800000	10910.9	36290
Sampang	2013	72.37	1104600	11623.8	54557
Sampang	2014	76.85	1120000	11632.9	72565
Sampang	2015	68.37	1231650	11874.5	77887
Sampang	2016	69.04	1387000	12606.8	110874

Pamekasan	2010	74.72	900000	6994.2	111605
Pamekasan	2011	75.32	925000	7429.4	96746
Pamekasan	2012	77.53	975000	7894	106451
Pamekasan	2013	77.97	1059600	8375.2	135806
Pamekasan	2014	75.08	1090000	8846.2	177487
Pamekasan	2015	70.05	1201750	9137.2	272949
Pamekasan	2016	71.08	1350000	9815.8	314271
Sumenep	2010	73.9	730000	15136.5	15938
Sumenep	2011	78.76	785000	16064.8	131261
Sumenep	2012	76.89	825000	17665	137569
Sumenep	2013	75.59	965000	20218.1	134794
Sumenep	2014	74.1	1090000	21476.8	146201
Sumenep	2015	69.99	1253500	21750.5	173040
Sumenep	2016	73.21	1398000	22311.7	234534
Kota Blitar	2010	66.16	663000	2855	32885
Kota Blitar	2011	65.24	737000	3038.4	58982
Kota Blitar	2012	64.75	815000	3236.6	64445
Kota Blitar	2013	66.53	924800	3446.8	64991
Kota Blitar	2014	66.46	1000000	3649.5	79293
Kota Blitar	2015	71.46	1243200	3857	110216
Kota Blitar	2016	71.9	1394000	4079.3	116617
Kota Malang	2010	63.81	1006263	31377.3	592363
Kota Malang	2011	68.72	1079887	33273.7	785552
Kota Malang	2012	64.16	1132000	35355.7	1004392
Kota Malang	2013	65.99	1340300	37547.7	1482429
Kota Malang	2014	63.66	1387000	39724.3	1647076
Kota Malang	2015	60.56	1882250	41951.6	1781167
Kota Malang	2016	64.77	2099000	44303.9	1639182
Kota Probolinggo	2010	63	741000	4921.3	560117
Kota Probolinggo	2011	63.93	810500	5213.9	642103
Kota Probolinggo	2012	67.71	885000	5552.1	674721
Kota Probolinggo	2013	67.71	1198600	5911.3	612961
Kota Probolinggo	2014	66.94	1250000	6261.9	545919
Kota Probolinggo	2015	63.61	1437500	6626.1	432743
Kota Probolinggo	2016	67.45	1603000	7018.3	349987
Kota Pasuruan	2010	63.29	865000	3585.4	117337
Kota Pasuruan	2011	66.15	926000	3810.7	71951
Kota Pasuruan	2012	68.09	1252000	4051.2	110208
Kota Pasuruan	2013	69.13	1720000	4315.1	174300
Kota Pasuruan	2014	67.78	1360000	4561.1	222647
Kota Pasuruan	2015	67.24	1575000	4813.3	384332
Kota Pasuruan	2016	67.14	1757000	5076.4	534397
Kota Mojokerto	2010	68.26	805000	2987.2	193878
Kota Mojokerto	2011	69.37	835000	3165.6	194452
Kota Mojokerto	2012	69.37	875000	3358.4	1026828
Kota Mojokerto	2013	69.37	1040000	3566.7	210184
Kota Mojokerto	2014	68.07	1250000	3774.5	268973
Kota Mojokerto	2015	68.07	1437500	3991.1	467098

Kota Mojokerto	2016	68.65	1603000	4221.5	401140
Kota Madiun	2010	66.63	685000	6081.2	161749
Kota Madiun	2011	66.63	745000	6494.4	147285
Kota Madiun	2012	62.83	812500	6937.7	154881
Kota Madiun	2013	66.39	953000	7470.7	168621
Kota Madiun	2014	63.54	1066000	7965.5	428401
Kota Madiun	2015	65.97	1250000	8455.4	402285
Kota Madiun	2016	67.76	1394000	8954.7	272598
Kota Surabaya	2010	63.02	1031500	231205	8466985
Kota Surabaya	2011	61.77	1115000	247687	11121576
Kota Surabaya	2012	66.14	1257000	265892	15438042
Kota Surabaya	2013	67.86	1740000	286051	21111515
Kota Surabaya	2014	66.56	2200000	305957	23543021
Kota Surabaya	2015	66.1	2710000	324228	25124041
Kota Surabaya	2016	66.36	3045000	343653	29177402
Kota Batu	2010	68.24	989000	6504.4	18280
Kota Batu	2011	72.64	1050000	6968	76163
Kota Batu	2012	70.25	1100215	7473.6	103450
Kota Batu	2013	70.58	1268000	8018.6	166234
Kota Batu	2014	70.38	1380037	8572.1	186700
Kota Batu	2015	68.6	1877000	9145.9	220343
Kota Batu	2016	73.35	2026000	9750.9	207274
Kota Kediri	2010	66.54	906000	57550.6	197058
Kota Kediri	2011	65.46	975000	60020.1	211426
Kota Kediri	2012	67.09	1037500	63185.1	244625
Kota Kediri	2013	64.18	1128400	65408.8	263112
Kota Kediri	2014	67.77	1165000	69232.9	242589
Kota Kediri	2015	65.7	1339750	72945.5	336965
Kota Kediri	2016	65.29	1494000	76959.4	338772

Lampiran 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.205679	3	0.0419

Lampiran 3. Hasil Estimasi

Dependent Variable: TPAK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/12/18 Time: 20:36
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.74352	0.611807	112.3614	0.0000
UMK	-1.02E-06	5.11E-07	-1.992661	0.0475
PDRB	5.52E-05	2.63E-05	2.100582	0.0368
INV	-5.61E-08	5.54E-08	-1.012616	0.3123

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.731637	Mean dependent var	69.11541
Adjusted R-squared	0.683929	S.D. dependent var	3.983802
S.E. of regression	2.239703	Akaike info criterion	4.591438
Sum squared resid	1128.660	Schwarz criterion	5.143781
Log likelihood	-569.6613	Hannan-Quinn criter.	4.813336
F-statistic	15.33545	Durbin-Watson stat	1.899046
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4. Uji Multikolinieritas

	UMK	PDRB	INV
UMK	1.000000	0.488198	0.332782
PDRB	0.488198	1.000000	0.760139
INV	0.332782	0.760139	1.000000

Lampiran 5. Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)

Dependent Variable: RES2
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/12/18 Time: 19:17
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.07861	14.95247	2.346008	0.0197
UMK	1.05E-06	1.30E-05	0.080413	0.9360
PDRB	-1.37E-05	0.000190	-0.072032	0.9426
INV	-1.45E-06	1.69E-06	-0.853639	0.3941
R-squared	0.007220	Mean dependent var		31.76917
Adjusted R-squared	-0.004148	S.D. dependent var		89.17146
S.E. of regression	89.35619	Akaike info criterion		11.83806
Sum squared resid	2091946.	Schwarz criterion		11.89195
Log likelihood	-1570.462	Hannan-Quinn criter.		11.85971
F-statistic	0.635148	Durbin-Watson stat		2.053773
Prob(F-statistic)	0.592959			

Lampiran 6. Uji Normalitas

